

**PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN KONTRIBUSI
KREDIT TERHADAP PENDAPATAN KOTOR UKM
RUMAHTANGGA SETELAH MENJADI KREDITUR
(STUDI KASUS BMT MU@MALAT)**

Shofia Nur Awami

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang

Abstract

Global crisis in 2008, there was a proud in economic development, because informal sector oppositely grow rapidly. Data from Statistic bureau mention that the increasing grew faster, became 47,7 million in 2007 period. The problem was financing. BMT Mu@malat as the one of non banking financial institution is under hierarchy of Kota Semarang Cooperation Department, it was stated under Wahid Hasyim University area. The research was meant to know about contribution of credit assessment to brutto income and what's the influence factor after this. The respondent was Marginal Sector client. Result from this was the assessment of BMT Mu@malat gave contribution of brutto income of 9,07 % per month, function and the existence was needed to support of people economy.

Pendahuluan

Di Indonesia, muncul dilema ekonomi mikro (informal) adalah sebagai dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias, menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal, yang sebagian besar terjadi di negara-negara sedang berkembang. Masalah sektor informal sebenarnya menjadi semakin penting keberadaannya, namun kondisinya sangat penting. Dan membengkaknya sektor informal dikota-kota besar juga sebagai akibat dari deras nya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota besar. Selama ini sektor formal dan informal berjalan dengan pertumbuhannya masing-masing. Sektor informal menjadi penyangga dari transformasi struktur ketenagakerjaan yang *unbalance*. Perlu disadari bahwa sektor informal pun mampu memberi kontribusi yang berarti, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kapasitas *output*-nya. Sektor informal bukan hanya sebagai tempat penampungan, tetapi juga menjadi alternatif yang komplementer terhadap sektor formal (Mulyadi, 2003:85).

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 lalu sampai datangnya krisis global tahun 2008 ini, ekonomi Indonesia terhitung belum bangkit dari

keterpurukannya. Indikatornya kualitas pembangunan ekonomi merosot dan kesempatan kerja di usaha formal semakin terbatas. Tapi ada yang membanggakan, usaha informal malah berkembang pesat. Setidaknya ini yang terjadi satu dekade terakhir. Data BPS menyebutkan jumlah usaha mikro meningkat pesat menjadi 47, 7 juta unit pada tahun 2007, bahkan diyakini saat ini sudah hampir 50 juta unit. Jumlah usaha kecil pada tahun 2004 mencapai 43,6 juta, termasuk usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia didominasi usaha informal. Diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan usaha mikro masih menjadi primadona dalam penciptaan kesempatan kerja (Adiningsih, 2009: 177).

Selanjutnya Bank Indonesia membagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dalam dua kategori. Pertama, LKM yang berwujud bank, seperti BRI Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua, LKM yang sifatnya non bank, seperti koperasi simpan pinjam, Baitul Maal Wattamwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat, arisan kelompok swadaya masyarakat (Adiningsih, 2009:179).

Secara umum Baitul Maal Wat-Tamwil yang termasuk dalam lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Bisnis secara syariah di Indonesia sendiri tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Dimana telah tercatat tiga bank umum syariah, 78 BPR syariah, dan lebih dari 2.000 unit Baitul Maal Wat-Tamwil. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2005).

BMT Mu@malat sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang berada di bawah naungan koperasi kota Semarang yang didirikan di lingkungan Universitas Wahid Hasyim. Berdiri pada tanggal 11 Mei 2003 yang didukung oleh para dosen, dan tokoh masyarakat. BMT Mu@malat mulai dioperasikan tanggal 2 Juni 2003 yang bertempat di Jalan Menoreh Raya No.94 Sampangan sebagai kantor kas. Sejak berdirinya di tahun 2003 hingga tahun 2005 BMT Mu@malat masih berstatus pra koperasi. Pada tahun 2005 sudah berbadan hukum di bawah naungan koperasi kota Semarang pada tanggal 26 Oktober 2005 dengan No: 180.08/BH/37. Sedangkan Kepengurusan dan pengawas BMT Mu@malat terdiri dari dosen-dosen dan untuk pengelolanya terdiri dari alumni Universitas Wahid Hasyim. Dari tahun 2003 hingga sekarang BMT Mu@malat sudah beranggotakan sekitar 400 anggota dan dari 400 anggota, 300 anggota yang (pernah) menjadi kreditur. Nasabah simpanan/tabungan meliputi dosen, karyawan, mahasiswa Universitas Wahid Hasyim, masyarakat sekitar, pedagang kaki lima dan pedagang pasar.

Dari permasalahan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya: (1). Bagaimana perbandingan pendapatan kotor sebelum menjadi kreditur dan setelah menjadi kreditur di BMT Mu@malat ? (2). Bagaimana peranan LKM dalam mengembangkan sektor informal/usaha mikro?

Bahan dan Metode

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2008. Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah metode deskriptif. Sampel dari penelitian kecil ini adalah nasabah dari BMT Mu@malat yang telah mempunyai usaha mikro atau usaha kecil dan mengajukan kredit untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya pengambilan sampel secara acak. Diambil sampel sebesar 10 persen dari keseluruhan sampel. Didapat responden nasabah sebanyak 30 orang. Pengambilan data melalui data primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada responden dan data sekunder dari BMT Mu@malat.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Keuangan Mikro ("BMT")

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. LKM ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan yang harus dipenuhi tidak dimiliki.

Dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, usaha mikro, memiliki makna yang strategis. Dilihat dari perspektif ini penguatan usaha mikro dengan wadahnya LKM berperan dalam dua saluran. Pertama, usaha mikro dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini disebabkan LKM relatif padat karya dengan modal yang kecil. Kedua, melalui pengembangan usaha mikro yang secara langsung terkait dengan penduduk miskin yang memiliki usaha produktif.

Pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980-an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitut-Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka

belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing-masing bank.

Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh perkembangan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun demikian adanya 2 jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Dalam UU No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- a). Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
- b). Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
- c). Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*Perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif.

Konsep Sektor Informal

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah dengan memperkuat peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKKM). Selama ini UMKM diakui keberadaannya sebagai penopang perekonomian masyarakat. Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 memberikan pelajaran bahwa UMKM sanggup memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan kesempatan kerja.

Pemerintah dan birokrasi masih mengalami kesulitan untuk menggarap dan membangun ekonomi mikro (informal) secara tuntas. Hal ini terbentur oleh beberapa kendala:

- a). Kurangnya pengetahuan deskriptif maupun analitis mengenai jenis, unit dan luas kegiatan ekonomi informal ini.
- b). Tidak mempunyai kekuasaan birokrat untuk mencapai daerah pedesaan, pinggiran kota, dan pemukiman kumuh yang kebanyakan digeluti oleh pelaku informal.
- c). Kurangnya tenaga yang mampu mengetahui dengan baik seluk beluk ekonomi informal.
- d). Tidak adanya sumber dana yang dapat mencukupi permintaan sektor tradisional yang luas ini.

Di Indonesia keberadaan kelompok informal usaha kecil dan menengah adalah paling dirugikan. Hal ini terjadi akibat ketimpangan dalam

proses alokasi dan distribusi peran antara sektor informal dan formal. Sektor informal di Indonesia, telah dicirikan sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
- b) Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- c) Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d) Pada umumnya kebijaksanaannya pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini.
- e) Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke lain subsektor.
- f) Teknologi yang dipergunakan bersifat tradisional.
- g) Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
- h) Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man-enter prises* dan jika mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- i) Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
- j) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan menengah.

Usaha Kecil (Usaha Mikro)

UKM atau kepanjangan dari Usaha Kecil dan Menengah, merupakan suatu usaha rumah tangga yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan guna meningkatkan taraf hidupnya. Usaha tersebut misalnya usaha asongan, usaha pembuatan/produksi jajanan, usaha bengkel, usaha pembuatan alat rumah tangga, usaha penjualan sayuran dan sebagainya (Tambunan dalam Khoeriyah, 2006).

Di Indonesia sendiri belum ada batasan dan kriteria yang baku mengenai usaha kecil. Berbagai instansi menggunakan batasan dan kriteria menurut fokus permasalahan yang dituju. Dalam UU No. 9/1995 pasal 5 tentang usaha kecil disebutkan beberapa kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

BPS (1988) mendefinisikan usaha kecil dengan ukuran tenaga kerja, yaitu 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri pekerja pasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan industri yang memiliki

tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga (*home industry*).

Menurut Stanley dan Morse, bahwa industri yang menyerap tenaga kerja 1 – 9 orang termasuk industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10 – 49 orang, industri sedang menyerap 50 – 99 orang, dan industri besar menyerap tenaga kerja 100 orang lebih.

Kontribusi Pinjaman/Kredit Terhadap Perkembangan UKM Nasabah BMT Mu@malat

Pendapatan kotor UKM rumahtangga nasabah BMT Mu@malat per bulan sebelum mengajukan pinjaman atau sebelum menjadi kreditur dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Pendapatan kotor per bulan UKM rumahtangga nasabah BMT Mu@malat sebelum mengajukan kredit, 2008.

No	Pendapatan kotor (Rp/bln)	Banyaknya Responden	Jumlah pendapatan kotor (Rp/bln)	Prosentase
1	50000	2	100000	6.67
2	200000	3	600000	10
3	400000	4	1600000	13.33
4	750000	9	6750000	30
5	1000000	12	12000000	40
	Jumlah	30	21050000	100
	Rata-rata		701666.67	

Sumber : Analisis data primer, 2008

Dari tabel 1.1 diatas, pendapatan kotor dari 30 UKM rumahtangga nasabah sebelum mengajukan kredit, paling tertinggi dan terbanyak per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu sebanyak 12 UKM atau 40 persen. Pendapatan kotor kedua, Rp. 750.000 per bulan sebanyak 9 UKM rumahtangga atau 30 persen. Rata-rata pendapatan kotor 30 UKM rumahtangga adalah sebesar Rp. 701.666,67 per bulan.

Sedangkan pendapatan kotor UKM rumahtangga setelah mengajukan pinjaman atau setelah menjadi kreditur di BMT Mu@malat dapat dilihat di **tabel 1.2**. Pendapatan kotor dari 30 UKM rumahtangga setelah mengajukan kredit, paling tertinggi per bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu sebanyak 18 UKM atau 60 persen. Pendapatan kotor kedua, Rp. 400.000 per bulan sebanyak 6 UKM rumahtangga atau 20 persen. Rata-rata pendapatan kotor 30 UKM rumahtangga adalah sebesar Rp. 771.666,67 per bulan.

Tabel 1.2. Pendapatan kotor per bulan UKM rumahtangga nasabah BMT Mu@malat setelah mengajukan kredit, 2008.

No	Pendapatan kotor (Rp/bln)	Banyaknya responden	Jumlah pendapatan kotor (Rp/bln)	Prosentase
1	100000	1	100000	3.33
2	200000	2	400000	6.67
3	400000	6	2400000	20
4	750000	3	2250000	10
5	1000000	18	18000000	60
	Jumlah	30	23150000	100
	Rata-rata		771666.67	

Sumber : Analisis data primer, 2008

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk melihat persentase kontribusi kredit yang diajukan UKM rumahtangga nasabah ke BMT Mu@malat terhadap pendapatan kotor per bulan, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{Pd\ Kt\ 2 - Pd\ Kt\ 1}{Pd\ Kt\ 2} \times 100\% \\
 &= \frac{771.666,67 - 701.666,67}{771.666,67} \times 100\% \\
 &= 9.07\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Pd Kt 1 = Pendapatan Kotor sebelum mengajukan kredit (Rp/bulan)

Pd Kt 2 = Pendapatan Kotor setelah mengajukan kredit (Rp/bulan)

Dengan mengajukan kredit di BMT Mu@malat, pendapatan kotor UKM rumahtangga sebelum mengajukan kredit dan pendapatan kotor setelah mengajukan kredit, menyumbangkan kontribusi sebesar 9.07 persen per bulan. Kontribusi sebesar 9.07 persen setiap bulannya, dapat diartikan UKM rumahtangga nasabah mendapatkan tambahan pendapatan kotor sekitar Rp. 70.000,- per bulannya, setelah mengajukan/mendapatkan kredit dari BMT Mu@malat.

Peranan LKM Bagi Pengembangan Sektor Informal/Usaha Mikro

Dari hasil penelitian, jika dilihat dari sisi nasabah (sebagai pelaku usaha mikro), dapat disimpulkan bahwa rata-rata alasan utama mereka menjalankan usaha mikro tersebut karena untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Hasil kuesioner dapat dilihat di tabel 1.3, berikut ini:

Tabel 1.3. Alasan utama menjalankan usaha mikro, 2008

No	Alasan menjalankan usaha	Banyaknya responden	Prosentase
1.	Untuk memperoleh penghasilan	25	83.34
2.	Untuk meperoleh pengalaman/ketrmp	4	13.33
3.	Untuk mengisis waktu luang	-	-
4.	Untuk memenuhi harapan suami/istri	1	3,33
	Jumlah	30	100

Sumber: Analisis data primer, 2008.

Besarnya harapan nasabah dalam menjalankan usaha mikro sebagai jalan untuk memperoleh penghasilan (83.34 %), dapat dikatakan bahwa penghasilan sebelum menjalankan usaha masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena untuk bekerja secara produktif disektor formal, mereka sudah tidak dapat tertampung lagi.

Salah satu upaya untuk memperkuat peran usaha mikro adalah dengan mendorong lembaga keuangan, khususnya perbankan untuk berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana. Pada prinsipnya lembaga perbankan memiliki peran ganda, (1) sebagai lembaga penyalur dana (*intermediary*) yang bersumber dari masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta dalam bentuk kredit, (2) lembaga perbankan juga menjalankan perannya sebagai agen pembangunan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, perbankan diharapkan dapat mendorong *pro poor growth*.

Disamping itu, bentuk LKM yang bermacam-macam, dan masing-masing LKM memiliki tingkat perkembangan dan kematangan yang berbeda-beda, yang akan berdampak pada pelayanan terhadap kelompok sasarannya. Tetapi bagi banyak penduduk miskin yang melakukan usaha produktif, LKM yang dapat memberikan pelayanan finansial secara ideal, ialah LKM yang memiliki ciri-ciri: a). Prosedur mendapatkan kredit sederhana, b). Persyaratan mudah dipenuhi, c). Biaya perolehan kredit murah, dan d). Pemberian kreditnya tepat

Perihal tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian. Hasil kuesioner tentang alasan mengambil kredit di BMT dan prosedurnya, dapat dilihat di tabel 1.4 dan tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.4. Alasan mengambil kredit di BMT, 2008.

No	Alasan mengambil kredit di BMT	Banyaknya responden	Prosentase
1.	Mengembangkan usaha	16	53,33
2.	Menambah keperluan keluarga	3	10
3.	Rendahnya suku bunga	3	10
4.	Pelayanan dan mutu karyawan	3	10
5.	Dekatnya lokasi BMT dengan rumah	-	-
6.	Prosedur dan persyaratan yang lebih mudah	6	16.67
Jumlah		30	100

Sumber: Analisis data primer, 2008.

Tabel 1.5. Prosedur mengambil kredit di BMT, 2008.

No	Prosedur dalam mengambil kredit	Banyaknya responden	Prosentase
1.	Sangat mudah	10	33,33
2.	Mudah	17	56,67
3.	Agak sulit	3	10
4.	Sulit	-	-
Jumlah		30	100

Sumber: Analisis data primer, 2008.

Alasan utama para nasabah ternyata untuk mengembangkan usahanya. Secara riil memang problem ‘klasik’ usaha mikro adalah masalah pendanaan. Padahal dialah sebagai ujung tombak penyelamatan kehidupan rakyat kecil. Karena itu, LKM yang merupakan sumber utama pembiayaan bagi sektor informal, perlu diperkuat. Mengingat sektor informal sulit untuk memenuhi persyaratan pengajuan kredit dari bank umum.

Kelebihan LKM dibandingkan lembaga keuangan lainnya adalah sifatnya yang fleksibel. Seperti halnya prosedur di BMT Mu@malat, responden menyatakan mudah (56,67%). Persyaratan pengajuan kredit dan jumlah pinjaman tidak seketat persyaratan bank umum.

Oleh karena itu, dituntut serta peran pemerintah yang lebih besar dalam memperkuat lembaga keuangan mikro. Hal ini dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan. Pendekatan langsung, pemerintah

memfasilitasi tersedianya bantuan manajemen/teknis kepada LKM-LKM yang memiliki potensi dan menyediakan infrastruktur yang mendukung penguatan LKM. Pendekatan tidak langsung, pemerintah menyiapkan iklim yang mendukung bagi perkembangan LKM melalui kebijakan dan regulasi fiskal, moneter dan perbankan (perbankan dapat memposisikan LKM yang potensial maju sebagai mitra bisnisnya. Selain itu kebijakan pemerintah juga diharapkan dapat melindungi LKM dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan usahanya.

Kesimpulan

1. Pengajuan kredit oleh UKM rumahtangga nasabah BMT Mu@malat memberikan kontribusi pendapatan kotor sebesar 9.07 persen per bulannya. Secara riil menambah pendapatan kotor per bulan sebesar Rp. 70.000,-
2. Banyaknya pelaku usaha mikro yang menjadikan usahanya sebagai sumber penghasilan, maka peran LKM sebagai sumber pendanaan usaha mikro, dituntut berperan aktif dalam menjalankan fungsinya. Selain itu dituntut juga, peran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2003. *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*. Gema PKM Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 2005. *Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun 2005*. BMT Muamalat. Semarang
- Adiningsih, Sri. 2009. *Kredit Mikro Untuk Mereka yang Lemah*. Artikel dalam Intisari Mei 2009.
- Dewi, Gemala. 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Khoriyah, S.I. 2006. *Kontribusi Pinjaman UPK PPK Terhadap Pendapatan UKM Rumah Tangga di Wilayah Desa Penundan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang*. Skripsi S1. Fakultas Pertanian. Universitas Wahid Hasyim. Semarang.
- Lewis, Mervyn K. 2004. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*. Serambi. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nasution, S. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara. Jakarta.

Suryana. 2003. *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*. Salemba Empat. Jakarta.